

PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS MASYARAKAT DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Djoko Koestanto

Staf Pengajar Program Diploma Kepariwisataan Universitas Stikubank Semarang

Public involvement is very important in the conservation of tourism environment, by keeping the originality of the society's cultures, keeping their hygiene, beauty, security, and environmental organization, giving services and facilities to the tourists during their visit. Besides, the society also plays the roles in making the beautiful memory to the tourists by providing the unique souvenirs which can be found only in local society, so that the society-based tourism management and they can encourage their roles in the environmental conservation together with the other tourism stockholders will be very important in the continuous tourism management.

Keywords: society-based tourism and environmental conservation

Perubahan dunia yang cenderung konstan selama dua decade terakhir telah menjadi pendukung pertumbuhan pariwisata yang berupa kegiatan maupun perindustrian. Menjelang tahun 1990 pariwisata telah menjadi industri terpenting ketiga didunia dibidang ekspor (setelah industri minyak dan kendaraan). Kepariwisataan telah menunjukkan daya tahan yang tinggi pada kondisi ekonomi dan politik yang sulit, tetapi pertumbuhannya menjadi lebih lambat ketika pasar menjadi jenuh.

Secara historis, sebagian besar kegiatan pariwisata merupakan pengembangan yang relatif baru, dan belum lama menjadi hal yang memiliki makna. Namun industri kepariwisataan cukup penting bagi perekonomian, sosial serta pelestarian lingkungan sebagai hal yang perlu dipertimbangkan.

Pelestarian lingkungan dan pelibatan peran masyarakat pada saat ini lebih mengarah pada pengertian yang lebih khusus sebagai pembangunan berkelanjutan baik dalam arti penyelamatan lingkungan maupun secara ekonomi dalam rangka keberkelanjutan usaha, dimana kedua unsure tersebut (peran masyarakat dan lingkungan) akan mampu menciptakan sebuah pola berkelanjutan yang lebih terjamin.

Selanjutnya peran serta masyarakat juga sangat penting didalam usaha pelestarian lingkungan pariwisata, dengan cara mempertahankan keaslian

budaya masyarakat setempat sesuai dengan aslinya , menjaga kebersihan, keindahan keamanan dan ketertiban lingkungan, memberikan pelayanan dan kemudahan kepada para wisatawan yang melakukan kegiatan wisata. Selain itu masyarakat berperan didalam memberikan kenangan indah bagi wisatawan melalui penyediaan souvenir / cinderamata yang unik dan hanya dimiliki masyarakat lokal. Sehingga pengelolaan kepariwisataan yang berbasis kepada masyarakat dan mendorong peran mereka dalam pelestarian lingkungan bersama stakeholder kepariwisataan lain sangat penting dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Data yang disampaikan World Tourism Organization (WTO) menunjukkan adanya beberapa kecenderungan dan perkembangan baru dalam dunia kepariwisataan yang mulai muncul pada tahun 1990-an. Kecenderungan ini ditandai dengan berkembangnya gaya hidup dan kesadaran baru akan penghargaan yang lebih dalam terhadap nilai-nilai hubungan antar manusia maupun dengan lingkungan alamnya.

Sejalan dengan hal tersebut perkembangan pariwisata dunia ditandai dengan munculnya kecenderungan baru yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi arah dan kinerja pariwisata global dimasa mendatang.

Pada tahun 1996 Menteri Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan statement bahwa pariwisata dan lingkungan harus berjalan bersamaan, berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu pengembangan pariwisata hendaknya lebih ditujukan untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan landasan

hukum yang menjadi dasar untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini adalah :

1. Undang-undang RI No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata ;
2. KM.94/UM.001/MPPT-94 tanggal 22 Nopember 1994 tentang pedoman teknis Penyusunan upaya pengelolaan lingkungan bidang pariwisata wajib AMDAL ;

Bahwa untuk rencana kegiatan pembangunan pariwisata yang diperkirakan menimbulkan dampak penting wajib menyusun AMDAL yang terdiri atas empat dokumen yaitu :

- a. Kerangka acuan analisis mengenai dampak lingkungan (KA AMDAL) adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan.
 - b. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan.
 - c. Rencana kelola lingkungan (RKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan.
 - d. Rencana pemantauan lingkungan (RPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan kegiatan.
3. KM.95/UM.001/MPPT-94 tanggal 22 Nopember 1994 tentang upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

Pembangunan Kepariwisata

Kepariwisata biasa dimengerti sebagai segala sesuatu hal yang berkenaan dengan pariwisata, sementara gejala terpusat pembangunankepariwisataan pada negara maju dan pada pemerintah nasional, dapat diatasi ketika disadari bahwa arti “membangun” adalah suatu upaya memperbaiki (Balai Pustaka, 1993 : 89), dan merupakan proses perubahan social yang terencana menuju kepada kondidi yang lebih baik (Tjokrowinoto, 2000). Selanjutnya pendapat itu dipertajam oleh Goodman bahwa :

In a term of social progress, development means improving the quality of live for the mass of people should provide two important things : (1). An equitable of distribution of wealth and (2). A broad popular participation int the political anda economic life of the country (Goodman, 1980 : 3)

sehingga pembangunan hendaknya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan berkesinambungan dalam arti tidak terjadi kerusakan baik alam maupun social(Budiman, 1996 : 8).

Pengertian pembangunan tersebut dalam good governance akan disangga oleh tiga kaki yaitu : economic, political dan administrative, dimana economic governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi didalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi dan berimplikasi pada equity, powerty dan quality of life, dan political governance sebagai proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, sementara administrative governance sebagai implementasi proses kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan perlu melibatkan tiga domain yaitu : state

(negara), privat (swasta) dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000 :5-6) yang didukung dengan karakteristik khas dari Good Governance yaitu : (1) Participation, (2). Rule of law, (3). Transparancy, (4) Responsiveness, (5). Consensus orientation, Equity, (6). Effectiveness and efficiency. (7). Accountability, (8). Strategic vision (LAN, 2000 : 7), sebagaimana dalam konteks yang lain (Partnership and participation : necessary element for poverty alleviation) dikatakan : To bring the rural poor into the center stage of development, many agents must be involved in close partnership external agencies and donors, central and local government, NGOs, grassroots institution, and other privat and commercial entities (Jazairy, 1992 : 342).

Selanjutnya agar agar lebih jelas , maka dalam kaitan ini sektor swasta dapat dibedakan dengan sektor masyarakat karena mempunyai pengaruh terhadap kebijakan social, politik an ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Sedangkan masyarakat terdiri dari individu maupun kelompok (baik dalam organisasi maupun tidak) yang berinteraksi social, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dll, dimana selanjutnya keberadaan negara menjadi paling penting, karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi keberadaan sektor swasta dan masyarakat. (LAN, 2000 : 7 – 8).

Sebagaimana konsep pembangunan yang melibatkan tiga unsure “penyangga” tersebut, maka sektor pariwisata perlu menempuh upaya untuk mencegah merebaknya pola kepariwisataan yang ekspansionis dan dikembangkan secara massif yang merugikan dengan pengembangan

kepariwisataan partisipatoris berbasis pada komunitas yang memiliki esensi tidak ada pemaksaan oleh alaan motif-motif dan kepentingan yang datang dari luar serta melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya , termasuk pemilikan dan penguasaan asset dan infra strukturnya (nasikun, 1999 : 11), karena kerangka pendekatan dan skala yang tidak memperoleh dukungan masyarakat akan menimbulkan ketegangan antara kepentingan masyarakat dan wisatawan, menurunnya mutu pengalaman wisata yang akan mengancam keberlanjutan perkembangan pariwisata itu sendiri.

Kemudian perlu disadari bahwa kesalahan pengelolaan pariwisata yang “meminggirkan” masyarakat akan berakibat dampak social budaya kepada pariwisata itu sendiri, seperti timbulnya semangat anti pariwisata, dan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar yang bertentangan dengan tujuan dari pariwisata (Goal pariwisata) seperti :

1. adanya kepuasan wisatawan yang diharapkan dapat datang kembali atau menyebarkan informasi yang baik pada orang lain ;
2. adanya imbalan yang memedahi bagi mereka yang terlibat dalam seluruh kegiatan wisata mulai dari perencanaan, pengembang, pengelola dan penyediaan layanan wisata ;
3. adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup , sehingga pemasukan yang diharapkan tidak hilang karena perbaikan lingkungan yang telah rusak tadi ;
4. adanya kegiatan pariwisata kedalam totalitas kehidupan masyarakat terutama aspek social ekonomi. Sehingga kegiatan pariwisata tersebut tidak eksklusif atau terpisah dari kehidupan social ekonomi penduduk

lokal yang bisa menyebabkan kecemburuan social atau masalah social lainnya (Sugiono, 1999 : 3).

Usaha Pariwisata

Usaha pariwisata sebagaimana diketahui terbagi dalam tiga kelompok besar yang meliputi jasa, obyek dan sarana pariwisata, dimana secara detail dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Usaha Jasa Pariwisata

Biro Perjalanan Wisata :

Jasa perencana perjalanan wisata

Agen Perjalanan Wisata :

Jasa perantara perjalanan wisata

Pramuwisata :

Impresariat :

Jasa pengurusan penyelenggaraan hiburan

Mice ;

Konsultan pariwisata

Informasi pariwisata

2. Usaha Obyek dan daya tarik wisata :

Wisata Alam

Pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan pariwisata

Wisata Budaya

Pemanfaatan seni budaya bangsa

Wisata Minat Khusus

Pemanfaatan wisata alam dan wisata budaya untuk menimbulkan daya tarik & minat khusus sebagai sasaran wisata.

3. Sarana Wisata

Akomodasi ;

Makan Minum ;
Angkutan Wisata ;
Wisata Tirta ;
Kawasan Wisata

Konsep Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Pengelolaan kepariwisataan berkelanjutan berorientasi pada dua domain, yaitu pelibatan masyarakat dan pelestarian lingkungan dimana antara keduanya tidak mungkin dipisahkan satu dengan lainnya, sehingga pada puncaknya kepentingan ekonomi sebagai salah satu tujuan utama usaha kepariwisataan diharapkan akan dapat menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan sebagai dampak nyata kepariwisataan berkelanjutan.

Amitabh Shukla dalam *Regional Planning and Sustainable Development* menerangkan dalam kerangka pembangunan regional yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan memerlukan syarat-syarat sbb. :

1. Regional planning would assist in utilizing the locally available natural and physical resources and technology (Perencanaan regional akan membantu kebutuhan lokal untuk memenuhi sumber daya alam, fisik dan teknologi)
2. it would assist in making plans which would fulfil the local demands (ini juga akan menciptakan perencanaan yang akan memenuhi kebutuhan lokal)
3. it would be helpful in reducing the imbalance and disparity across and within the regions (ini juga akan menolong mengurangi ketidakseimbangan dan perbedaan di antara dan di dalam suatu kawasan)
4. it would assist in tackling the problem of poverty, unemployment and urbanization when productive employment would be available at local level (ini

- juga akan membantu permasalahan kemiskinan, pengangguran dan urbanisasi ketika tenaga kerja produktif berperan pada tingkat local)
5. When every region will grow then it would be easier to achieve the targets of higher growth rate of different sector and higher growth rate of economic too (ketika setiap wilayah akan tumbuh, kemudian ini akan mempermudah untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi pada setiap sector, termasuk sector ekonomi)
 6. Regional planning will assist in overcoming sector or centralized planning and it would assist in making link between sector and regions (perencanaan regional akan membantu dalam mengatasi pola sentralistik dan juga membantu menciptakan kerja sama antar sector dan wilayah)
 7. Optimum utilization of natural resources, fulfillment of local needs through regional planning and it would assist to achieve sustainable development. (pemanfaatan maksimal dari sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan local melalui perencanaan regional akan membantu tercapainya pembangunan berkelanjutan).

Pembangunan yang berkelanjutan / sustainable development (The World Conservation Union (IUCN))

- Proses pembangunan yang tidak merusak atau menurunkan kualitas sumber daya. hal tersebut dapat dicapai melalui pengelolaan lingkungan, sehingga sumber daya dapat diperbaharui pada tingkat pemanfaatan tertentu dan akhirnya mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan masa yang akan datang.
- **Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan**
Adalah pariwisata yang secara langsung / tidak langsung bergantung pada sumber daya secara luas dan juga terhadap kesadaran dan kepekaan masyarakat dan pemerintah terhadap isu-isu lingkungan.
- **Pembangunan yang berkelanjutan** merupakan dasar bagi pengelola usaha pariwisata yang berkaitan dengan alam, lingkungan binaan dan lingkungan social budaya agar dapat tetap melanjutkan pembangunan

ekonomi, selain itu, karena konsumen yang semakin sadar dan menuntut suatu daerah tujuan wisata yang memperhatikan kualitas lingkungan yang baik.

Pariwisata yang berkelanjutan :

1. Marsongko :

Pariwisata yang dibangun disuatu tempat apapun bentuk dan skala pengembangannya akan tetap layak untuk jangka waktu yang tidak terbatas tanpa merusak ataupun menurunkan kualitas lingkungan baik fisik maupun manusia.

2. Mc Intyre :

Suatu model pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat local untuk jangka pendek dan panjang ; memberikan pelayanan dan kualitas pengalaman yang baik kepada pengunjung ; dan menjaga kualitas lingkungan untuk mencapai dua hal diatas.

Kriteria pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (long & glendinning , dalam Marsongko) :

1. Pariwisata harus direncanakan dan dikelola sebagai upaya pelestarian, perlindungan dan meningkatkan kualitas dari sumber daya, yang merupakan modal bagi pengembangnya ;
2. Pembangunan harus sesuai dengan daerah setempat dengan tetap memperhatikan budaya , tradisi dan lingkungan setempat ;
3. Pembangunan pariwisata harus terintegrasi dengan pembangunan sector ekonomi lainnya sebagai upaya memaksimalkan manfaat ekonomi bagi daerah setempat ;
4. Manfaat pariwisata harus merata, dan keuntungan ekonomi harus diprioritaskan bagi masyarakat lokal.

Mowforth & Munt

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan :

Adalah bahwa suatu usaha pariwisata harus berkelanjutan dari segi lingkungan, social budaya, dan ekonomi ; memperhatikan pendidikan, serta melibatkan masyarakat lokal .

Kirk ; Middleton & Hawkins, Delpech & Marsongko, menyebutkan bahwa pengelolaan sumberdaya dalam usaha / produk pariwisata antara lain harus dimulai adanya :

1. Suatu kerangka yang mengintegrasikan pengelolaan sumberdaya dan komitmen manajemen dalam kebijakan usaha pariwisata ;

2. Membentuk green task force (upaya-upaya penghijauan) dengan melibatkan SDM pada usaha pariwisata yang bersangkutan, melalui motivasi dan pelatihan ;
3. Melakukan audit terhadap pemakaian energi dan air , limbah padat dan cair serta produk-produk ramah lingkungan dalam proses pelayanan ;
4. Menyusun program-program pengelolaan ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek legal ISO 140001 ; kebijakan nasional, dll ;
5. Menerapkan dan mengaplikasikan 3 “R” (reduce ; re-use ; recycle) dan upaya recovery bila diperlukan ;
6. Penyusunan program-program ramah lingkungan ;
7. Program kemitraan (LSM, individu, kelompok, lembaga lain terkait) ;
8. Implementasi ; pemantauan dan evaluasi terhadap program yang telah disusun ;
9. Langkah-langkah penyesuaian ;
10. Kontinuitas tindakan.

Penjelasan tersenut semakin memperkuat domain masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang terencana secara regional sebagai unsure penting dalam upaya mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Namun demikian pada kenyataannya secara yuridis formal persalin pengendalian dampak lingkungan lebih cenderung menjadi pusat perhatian, terbukti banyaknya aturan yang telah memuat hal tersebut, yang biasa engan peristilahan AMDAL atau bentuk produk hukum lingkungan yang lain, sementara kecenderungan masyarakat untuk dijadikan obyek dan kurang terlibat dalam merumuskan masalah dan penyusunan kebijakan untuk dirinya sendiri, perlu dirubah dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang didasarkan atas keterlibatan partisipasi masyarakat, sehingga dalamkaitan ini perlu kiranya ada perbaikan konsep yang semestinya berlaku seperti :

1. Merumuskan masalah bersama-sama antara katalisator dengan masyarakat, rumusan tersebut didasarkan atas masalah yang sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat ;
2. Pemecahan didekati dengan cara yang disepakati oleh masyarakat dan katalisator disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat ;
3. Harus dilakukan pula pendekatan yang justru membangun kesadaran dan memberdayakan masyarakat agar mampu

memecahkan masalah yang dihadapi dengan kekuatan mereka sendiri (Zubair, 1999 : 4)

Yang perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan pariwisata yang melibatkan masyarakat dengan menggunakan kiat sebagai berikut :

1. Pengembangan sikap mau belajar masyarakat dan sudah saatnya diubah pandangan bahwa masyarakat adalah awam dan bodoh, karena pada dasarnya masyarakat memiliki kearifan justru belajar langsung dari pengalaman hidup yang telah berlangsung sekian generasi ;
2. Berdasarkan realitas kearifan masyarakat itulah yang mendorong katalisator agar ketika berhadapan dengan mereka, tidak bersiafat menbggurui tetapi mendengarkan dan mencoba memahami apa yang menjadi masalah serta cara penyelesaiannya ;
3. Antara masyarakat setempat dengan orang luar yang lebih bersifat katalisator , artinya memotivasi dinamika masyarakat tanpa menghilangkan jati diri masyarakat tersebut, terjadi saling berbagi informasi, gagasan serta pengalaman.(Zubair, 1999 : 4)

Pembangunan kepariwisataan berpola berkelanjutan perlu diupayakan melalui kiat tersendiri, atau biasa disebut sebagai strategi untuk menghasilkan sebuah keputusan strategis yang langka dan benar-benar “menohok” pada permasalahan yang sebenarnya dihadapi (Utomo, 2000), dan akan dituangkan dalam suatu proses “perencanaan strategis” , sebagai upaya menjawab persoalan / isu strategis pembangunan kepariwisataan berkelanjutan yang memperhatikan tuntutan kepentingan-kepentingan internal dan eksternal dari lingkungan sekitar termasuk tuntutan misi serta mandat unit analisis penelitian tersebut. Perencanaan strategis , sebagai out put dari suatu proses interaksi antara tujuan awal (Plan for planning) yang didukung oleh mandat dan misi dai para stakeholder yang dipengaruhi dan diarahkan oleh tuntutan lingkungan internal dan eksternal sehingga menghasilkan isu strategis yang selanjutnya akan digunakan untuk menemukan strategi kelembagaan, dan Bryson memberikan pengertian strategi sebagai :

“ A plan to achieve the mission and meet the mandates”. (Bryson, 1995 : ix)

.Lebih jauh Bryson mengatakan bahwa :

“ A strategy, therefore, is the extension of an organization’s (or communitiry’s) mission, forming a bridge between the organization its environment Strategies are typically developed to deal with strategic issue ; that is, they out line an organization’s response to fundamental challenges it faces” (Bryson, 1995 : 130)

dimana pengetahuan itu memuat upaya tentang jawaban terhadap persoalan-persoalan dalam isu-isu strategis dan respon lembaga terhadap pilihan kebijakan pokok berujud strategi, yang dalam kaitan ini mensyaratkan adanya komitmen serta konsistensi lembaga terhadap apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan.

Selanjutnya untuk menjaga akurasi suatu strategi maka Bryson membagi strategi menurut level dan waktu yaitu : (1) Grand Strategy, (2) Strategic public planning unit, (3) Program of service, (4) Functional strategic (Bryson, 1995 : 132) dan proses formulasi strategi yang menuntut adanya komitmen manager puncak untuk menggarap lingkungan dengan segala bentuk perubahan dan ketidakpastian menjadi pertarungan kedepan.

KESIMPULAN

Pelestarian lingkungan dan pelibatan peran masyarakat pada saat ini lebih mengarah pada pengertian yang lebih khusus sebagai pembangunan berkelanjutan baik dalam arti penyelamatan lingkungan maupun secara ekonomi dalam rangka keberlanjutan usaha, dimana kedua unsure tersebut (peran masyarakat dan pelestarian lingkungan) akan mampu menciptakan sebuah pola berkelanjutan yang lebih terjamin.

Selanjutnya, peran serta masyarakat juga sangat penting didalam usaha pelestarian lingkungan pariwisata, dengan cara mempertahankan keaslian budaya masyarakat setempat sesuai aslinya, menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan, memberikan pelayanan dan kemudahan kepada para wisatawan yang melakukan kegiatan usaha. Sehingga pengelolaan kepariwisataan yang berbasis kepada masyarakat dan mendorong peran mereka dalam pelestarian lingkungan bersama stakeholder kepariwisataan lain sangat penting dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Namun untuk itu semua segala upaya tersebut perlu direncanakan secara menyeluruh kewilayahan dalam kerangka sinergi yang optimal, sebagaimana dikatakan Amitabh Shukla : Optimum utilization of natural resources, fulfillment of local needs through regional planning and it would assist to achieve sustainable development. (pemanfaatan maksimal dari sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan lokal melalui perencanaan regional akan membantu terciptanya pembangunan berkelanjutan).

REKOMENDASI

Menyikapi fenomena perkembangan kepariwisataan secara menyeluruh akhir-akhir ini , yang segera perlu dilaksanakan dalam rangka memvisualisasikan kepariwisataan berkelanjutan perlu melaksanakan beberapa kegiatan seperti :

1. Segera melaksanakan Promosi lokal, nasional dan internasional
2. Segera melaksanakan Kerjasama pemasaran, promosi dan paket wisata
3. Segera melaksanakan epembangunan masyarakat lingkungan, ekonomi, pengelola obyek
4. Segera melaksanakan evaluasi program konservasi
5. Segera melaksanakan konservasi berorientasi habitat
6. Segera melaksanakan kerjasama pemberdayaan, tata ruang, sarana prasarana pendukung
7. Segera melaksanakan analisis pesaing, pasar, konsumen
8. Segera melaksanakan pembuatan defersivikasi segmentasi baru